Globethics Repository



Sisitem Pemerintahan Tradisional Kerajaan Gorontalo

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal volume
Authors	Hasanuddin
Publisher	Balai Pelestarian Nilai Budaya
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-13 22:34:43
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/159538

ESAGENANG

Volume 13 | No. 23 Februari 2014 | Hal 14 - 24

SISTEM PEMERINTAHAN TRADISIONAL KERAJAAN GORONTALO

Oleh:
Hasanuddin

Pos-el: anwar_hasanuddin@yahoo.com
Balai Pelestarian Nilai Budaya Manado
Jalan Katamso, Bumi Beringin Lingkungan V
Telepon (0431) 855311 / Faksimile. (0431) 864926

Abstrak

Makalah ini merupakan menguraikan beberapa aspek tentang sistem pemerintahan Kerajaan Gorontalo yang dianggap dapat memberi makna bagi pembangunan karakter bangsa yang tentunya pernah dialami Gorontalo. Sejarah pemerintahan kerajaan Gorontalo dipandang penting guna mengetahui bagaimana proses pemerintahan demokratis yang pernah dialami Gorontalo dalam dinamika sejarah dan peradabannya.

Kata Kunci: Kerajaan Gorontalo, Sejarah, Pemerintahan

Abstract

This article is writeing some aspects of Gorontalo Kingdom, almostly government system. It gives a symbol of character building to Gorontalo society. Gorontalo history is more important to know procces democratic and civilication value of Gorontalo.

Key Word: Gorontalo Kingdom, History, Government

1. Pendahuluan

Gorontalo adalah sebuah wilayah kerajaan tradisional yang pernah berhasil membangun suatu sistem "demokrasi" yang unik. Wilayah ini juga relatif sukses menyerap berbagai bentuk perjumpaan budaya dan kuasa dengan kawasan sekitarnya di Timur Nusantara. Dalam dinamika sejarah Nusantara, Gorontalo tampaknya tidak pernah sepenuhnya mengalami proses peminggiran yang membuatnya kehilangan peran dan identitas baik di tingkat regional Sulawesi maupun di tingkat nasional ketika *nation-state* Indonesia dibentuk oleh gelombang gerakan nasionalisme. Namun, sebagaimana juga telah dialami oleh banyak lokalitas di Nusantara, harus dikatakan bahwa masa kolonial telah membawa banyak pengaruh dalam formasi sosial, teritorial, ekonomi, politik dan budaya pada masa-masa berikutnya.

Lokasi geografis Gorontalo terletak di bagian utara pulau Sulawesi - antara Bolaang Mongondow, Buol, dan kerajaan-kerajaan di kawasan Teluk Tomini. Peristiwa-peristiwa masa lalu Gorontalo hanya dapat dipetakan

dengan pertama-tama memahami ciri sosial-kulturalnya, pergumulan dengan teritori lain di Sulawesi dan sekitarnya, serta bagaimana hal itu mempengaruhi dinamika budaya dan politik di wilayahnya. Salah satu ciri mendasar adalah peranan persekutuan *Limo lo pahalaa* (persekutuan lima kerajaan),[1] terdiri dari Gorontalo (*Hulontalo*); Limboto (*Limoetu*); Bone-Suwawa-Bintauna; Bolango - selanjutnya kedudukannya diganti Boalemo (*Baolemo*); dan terakhir Atingola (*Andagile*).[2]

Dalam dinamika persekutuan *Limo lo pohalaa* tersebut, peranan Gorontalo mempunyai arti penting, terutama karena cenderung mendominasi identitas politik *Limo lo pohalaa*. Hal ini adalah sebuah pencapaian identitas yang sangat dinamis dalam sejarah di wilayah ini. Dalam perjalanan sejarahnya, perubahan demi perubahan terus terjadi dan saling berhubungan. Melalui proses pengambilan keputusan yang kompleks dan saling berkaitan, raja dan pembesar Kerajaan Gorontalo bersama-sama dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat dipandang telah memberikan sumbangan masing-masing pada usaha menjawab setiap perubahan di lingkungan mereka, baik di dalam maupun di luar kerajaan.

Beberapa sumber menjelaskan bahwa Kerajaan Gorontalo di bawah pengaruh (vasal) Kesultanan Ternate, pada periode pengaruh Sultan Baabullah Daud Syah (1570-1583) yang juga dikenal dengan julukan sebagai "raja 72 pulau". Pada masa puncak kejayaannya, Sultan Baabullah menempatkan 10.000 pasukannya di Gorontalo dan Limboto.[3] Walaupun demikian, pada dasarnya Gorontalo dan Ternate mempunyai hubungan persaudaraan dalam arti kedudukan Ternate sebagai 'saudara tua' bagi Gorontalo, sedangkan Gorontalo sebagai 'saudara muda' bagi Ternate. Dengan demikian, dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa status Ternate lebih tinggi dari Gorontalo. Bukti adanya ikatan hubungan persaudaraan itu ditunjukkan ketika Gorontalo diberi hadiah sebuah perisai tembaga oleh Sultan Ternate.[4] Pemberian itu memberi arti bahwa Ternate wajib melindungi atau membantu Gorontalo dalam setiap permasalahan. Ini tidak mengherankan karena dalam banyak hal Gorontalo menerima pengaruh dari Ternate, hal ini tampak dalam penamaan beberapa jabatan birokrasi Kerajaan Gorontalo, seperti *jogugu*, *kapitan* laut, *marsaoleh*, dan sebagainya.

Setiap pemerintahan mempunyai struktur birokrasi yang berjenjang dan menjadi alat kontrol. Puncak birokrasi pemerintahan dijabat seorang raja atau kepala pemerintahan yang sangat ditentukan otoritasnya di kerajaan atau negara. Menurut Weber bahwa otoritas dibedakan dalam tiga kategori yaitu otoritas tradisional, otoritas karismatik, dan otoritas legal rasional. Kepala pemerintahan kerajaan biasanya mempunyai dua jenis otoritas yaitu tradisional dan karismatik, sedangkan

1 Pembentukan persekutuan *Limo lo pahalaa* dimulai dari disepakatinya penyelesaian konfrontansi (perdamaian) antara Kerajaan Gorontalo dengan Limboto pada tahun 1673. Akhirnya persekutuan kedua kerajaan tersebut berkembang menjadi *Loudulluwa limo lo pahalaa* artinya dua kerajaan - Gorontalo dan Limboto - telah mempersatukan kerajaan sekitarnya dalam lima kerajaan setelah masuknya Kerajaan Bone, Bolango, dan Attingola. Akhirnya persekutuan kerajaan ini kemudian berkembang menjadi *Limo lo pahalaa*. Baca B.J. Haga. 1931. *De Lima-pahalaa (Gorontalo): Volksordening, adatrecht en bestuurspolitiek*. LXXI. Bandoeng: A.C. Nix & Co, hlm. 1-2; Baca juga Richard Tacco. 1935. *Het Volk Van Gorontalo: Historich Tradisioneel Maatschappelijk Cultural Sociaal Karakteristiek En Economisch*. Gorontalo: Gorontalo Drukkerij, hlm. 81; Baca juga J. Bastiaans. 1996. "Persekutuan Limbotto dan Gorontalo" dalam Taufik Abdullah (ed.). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 212-215.

2 G.W.W.C Baron van Hoevel. 1891. "Onder Rechtstreeksch Bestuur Is Gebracht", *De Assistant-Residentie Gorontalo.* Leiden: E.J. Brill, hlm. 4. Kerajaan-kerajaan dalam persekutuan *Limo lo pohalaa* kini menjadi wilayah administratif daerah Kabupaten Gorontalo (Limboto), Bone-Bolango, Gorontalo Utara (Atingola), Boalemo, Pohuwato, dan Kota Gorontalo (Gorontalo). Warisan sejarah inilah yang diambil pedoman dalam pembentukan Propinsi Gorontalo setelah mengalami pemekaran daerah dari Propinsi Sulawesi Utara melalui UU No. 38 tahun 2000, tanggal 22 Desember 2000.

3 Sartono Kartodirdjo, 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium.* Jilid 1. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 57.

4 B.J. Haga, *op.cit.,* hlm. 35-36.

pemegang pemerintahan modern menganut otoritas legal rasional.[5]

Dalam pembentukan kerajaan Gorontalo dan penobatan *olongia lipu* (raja) dilaksanakan melalui sistem demokrasi. Pembentukan kerajaan dilakukan melalui penyatuan tujuh belas *linula* (rumpun komunitas kecil), begitupula dalam pemilihan dan penobatan seorang *olongia lipu* dilaksanakan melalui musyawarah *Bantayo Poboqide* (dewan kerajaan).[6] Kontrol kekuasaan kerajaan berada pada dewan kerajaan, hal ini mencerminkan bahwa kedudukan *olongia lipu* tidak mempunyai hak mutlak dalam pengambilan keputusan. Demikian pula kedudukan seorang raja dicapai melalui usaha atau perjuangan (*achievement status*), bukan kedudukan yang telah diwariskan atau diturunkan (*ascribed status*).

Hal ini berbeda dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara, konsep kekuasaan raja di lingkungan kebudayaan Jawa menunjukkan bahwa pribadi raja adalah sakral dan penuh kharisma. Dalam Surat Niti Sastra dikatakan raja adalah unsur mutlak untuk menjamin ketertiban dalam masyarakatnya, disamping itu kedudukan raja ada di atas hukum. Dalam ajaran Wulan Reh dinyatakan pula bahwa kedudukan raja dikehendaki Tuhan untuk berkuasa di seluruh negerinya, sehingga apabila tidak mengindahkan perintahnya berarti mengabaikan perintah Tuhan. Demikian pula di Sulawesi Selatan genealogi kerajaan-kerajaan Bugis dan Makassar di antaranya Gowa, Luwu dan Bone kembali kepada raja pertama yang turun dari langit sebagai Tomanurung dan oleh rakyat diangkat menjadi raja. Bagi genealogi kerajaan Melayu seperti Aceh, Siak, Palembang, Sungai Raja, Palalawan dan Pontianak dihubungkan dengan Negeri Arab - Hadralmaut- sebagai asal nenek moyangnya.[7]

Pada prinsipnya semua kerajaan tersebut diatas mempunyai otoritasnya yang bersifat tradisional dan kharismatik dan mendapat legitimasi untuk menjalankan kekuasaan serta kepemimpinannya dalam menduduki takhta kerajaan. Di wilayah Gorontalo, terdapat kenyataan lain yang juga menarik diberi perhatian yaitu tentang kedudukan raja perempuan. Sumber-sumber sejarah menuliskan beberapa nama raja perempuan di Gorontalo dan Limboto dengan jumlah yang signifikan.[8]

Harus kami katakan bahwa dalam perkembangan historiografi Indonesia, masih terbatas penelitian sejarah yang mengkaji Gorontalo, khususnya tentang sistem pemerintahan dan kedudukan olongia lipu Gorontalo dalam menjalankan kekuasaannya. Padahal daerah ini memiliki sejarah dinamis dan sekaligus sebagai salah satu wilayah yang berhasil mengintegrasikan wilayahnya dengan memadai.[9] Dilihat dari proses perkembangan sejarah Indonesia, maka penting untuk mengkaji wilayah Gorontalo karena dapat memberi arti tambahan dan pendalaman wawasan kesejarahan di Nusantara, untuk selanjutnya diharapkan

5 Suhartono. 1996. "Birokrasi, Kolusi dan Kriminalitas: Refleksi Historis" dalam *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta: UGM.

6 Anggota dewan kerajaan adalah 17 pemimpin *linula*, kemudian berkembang dengan melibatkan para *bate* duduk dalam dewan kerajaan.

7 Sartono Kartodirdjo. 1993, *op.cit.*, hlm. 46-48.

8 Tercatat misalnya di Limboto: Raja Tolangohula, Putri Nggealo, Putri Mitu, Putri Moliye, Putri Apolo, Putri Moniyo, Putri Pongaito, Putri Mitu II (1566), Putri Dellauwo (1636), Putri Ntihendu (1660), Putri Pulu atau Tintito (1700). Sementara di Gorontalo tercatat Putri Ntihendu (1490), Putri Wulutileni (1578), Putri Moliye III (1605), Putri Mboheleo (1611), dan Putri Tiduhula (1647). Baca M. H. Lipoeto. 1949. *Sedjarah Gorontalo, Limo lo Pohalaa*. Jilid X. Gorontalo: Pertjetakan Ra'jat, hlm. 46, dan edisi tahun 1950, jilid XII, hlm. 36. Tentu saja masih dibutuhkan sumber data lanjutan untuk memastikan apakah mereka memang benar menduduki sebagai raja utama atau pembesar kerajaan atau keluarga bangsawan.

9 Kita patut memberi apresiasi sebuah karya penting yang khusus menggambarkan tentang *Limo Pohalaa*, terutama pada masa VOC, dengan mendalam telah dikaji oleh Harto Juwono & Yosephine Hutagalung (2005), *Limo lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. Karya ini memang lebih banyak menggunakan sumber-sumber arsip dan laporan kolonial masa VOC secara ekstensif, tapi relatif menggambarkan sumber-sumber lokal dan data yang lebih 'hidup' sehingga dapat lebih menggambarkan dimensi sosial dan dinamika kultural Gorontalo sebagai sebuah kesatuan.

dapat memberi makna otentik bagi jati diri bangsa.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang mengacu kepada tahapan-tahapan yaitu: pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan penulisan (historiografi).[10] Pada tahap heuristik, penulis mencari dan menemukan sumber sejarah yang berkenaan dengan sistem pemerintahan Kerajaan Gorontalo.

Mengenai sumber-sumber sejarah diperoleh melalui studi pustaka baik dari perpustakaan umum dan Perpustakaan Nasional, Jakarta, dapat disimpulkan bahwa penulisan tentang Gorontalo masih minim. Beberapa tulisan yang didapatkan seperti C.B.H. von Rosemberg (1865), Reistogten in de Afdeeling Gorontalo, melalui laporan perjalanan dinasnya dengan mencatat keadaan masyarakat Gorontalo. Begitupula B.J. Haga (1931), De Limo-pahalaä (Gorontalo): Volksordening, adattrecht en bestuurpolitiek (Lima pahalaä: Susunan masyarakat, hukum adat dan kebijaksanaan pemerintahan di Gorontalo) dalam perjalanan dinasnya ke Gorontalo, lebih menyoroti peranan hukum adat pada masyarakat di lima kerajaan. Laporan G.W.W.C Baron van Hoevel (1891), "Onder Rechtstreeksch Bestuur is Gebracht", De Assistant-Residentie Gorontalo dan H.Ph.Th. Witkamp (1898), Handleiding bij de Kaart van Noord-Celebes, hanya memberikan keterangan ringkas menyangkut keadaan umum masyarakat Gorontalo. Demikian pula Richard Tacco (1935), Het Volk Van Gorontalo: Historich traditioneel maatschappelijk cultureel sociaal karakteristiek en economisch, memberi pengetahuan keadaan masyarakat Gorontalo masa lalu melalui rekaman tertulis tanya jawab antara controleur dengan marsaoleh. Sumber selanjutnya adalah 13 seri karya tulis M.H. Lipoeto (1947, 1949, 1950), Sedjarah Gorontalo, Doea Limo Pohalaa, yang banyak mengutarakan asal-usul penduduk dan kampung-kampung (linula) di Gorontalo, nama-nama raja di wilayah Limo pohalaa, serta kejadian-kejadian penting lainnya (penyebaran Islam) dan persekutuan kerajaan.

Sumber-sumber menyangkut Gorontalo tersebut di atas kemudian dianalisa atau dikoreksi ulang, sebab titik tolak karya sejarah adalah mengenal pengunaan sumber, baik primer maupun sekunder. Frederick (1984) menyatakan bahwa landasan utama metode sejarah adalah bagaimana menangani bukti-bukti sejarah yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan ditulis. Kemudian sumber-sumber yang didapatkan dipelajari dan dipertimbangkan, mana yang sesuai dan berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.[11] Pada tingkat teoritis yang menggunakan metode kritis-historis, data-data historis perlu dilakukan penghubungan dan menerangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan penulisan yang dikaji, sehingga dapat menjadi sebuah penulisan sejarah (historiografi) atau kisah sejarah.[12]

3. Hirarki Kerajaan Gorontalo

Proses terbentuknya Kerajaan Gorontalo relatif berlainan dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Kerajaan Gorontalo berawal dari kekuasaan rakyat yang menyatu dalam suatu bentuk teritori dan komunitas terbatas bernama linula, yang umumnya didasarkan pada hubungan antar keturunan.[13] Adapun linula tersebut adalah

10 Nugroho Notosusanto. 1978. *Masalah Penelitian Kontemporer* (*Suatu Pengalaman*). Jakarta: Yayasan Idayu, hlm. 11-12.

11 William H. Frederick & Soeri Soeroto, (peny.). 1984. Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES, hlm. 13-14.

12 Sartono Kartodirdjo. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 18-19.

13 B.J. Haga, *op.cit*., hlm. 4. Pembentukan *linula* berasal dari *ngalaa* (keluarga batih) dan pola kehidupannya berada dalam sebuah rumah besar disebut *laihe*. Dari *laihe* muncul kepemimpinan yang dijabat oleh seorang anggota tertua, berwibawa, dan

Hungginaa, Lupoyo, Billingata, Wuwabu (Uwabu), Biawao, Padengo, Huangobotu, Tapa, Lawuwono, Tuto, Dumati, Ilotedia, Patonggo, Panggulo, Huanggobotu, Tamboo, dan Hulontalangi.[14] Ketujuh belas kemudian berintegrasi dengan membentuk satu kerajaan (lipu).

Seorang olongia lipu dipilih dan diangkat melalui proses pemilihan dari tujuh belas pemimpin linula yang disebut sebagai olongia. Para olongia kemudian memilih seorang olongia lipu dan mengangkat olongia Hulontalangi bernama Ilahudu sebagai olongia lipu pertama.[15] Di antara tujuh belas linula, Hulontalangi adalah linula yang terbesar dan olongia lipu pertama yang tercatat dalam laporan arsip adalah Halawadula (Ilahudu), kemudian mengawini Tantanghula (Tulanggohula) sebagai Olongia Limutu (Limboto).[16]

Setiap penobatan olongia lipu dilaksanakan melalui upacara adat dan disaksikan oleh tuango lipu (rakyat). Sebelum pelaksanaan penobatan, calon raja harus memahami ikrar melalui tujai sebagai berikut:

huta-huta loito-eja	*tanah-tanah diperuntukkan bagi tuanku*
taluhu-taluhu-itoeja	*air-air diperuntukkan bagi tuanku*
dupato-dupato-itoeja	*angin diperuntukkan bagi tuanku*
tulu-tulu itoeja	*api diperuntukkan bagi tuanku*
tawu-tawu loitoeja	*rakyat diperuntukkan bagi tuanku*

Namun pada masa penobatan Eyato sebagai raja bergelar Olongia To Tilayo ikrar tersebut ditambahkan kalimat "bo diya poluliya hilawa, Tapolo!", artinya bagi tuanku tidak diperbolehkan menyalahgunakannya.[17] Penambahan kalimat diatas setelah kerajaan mendapat pengaruh Islam yang disesuaikan dengan Syariat Islam tentang tidak adanya kekuasaan mutlak seorang manusia termasuk olongia lipu.

Pada struktur birokrasi Kerajaan Gorontalo, penguasa tertinggi dijabat olongia lipu, dan ia dibantu oleh sebuah dewan kerajaan, disebut Bobato Lo Lipu yang anggotanya terdiri dari para pejabat kerajaan. Seluruh pejabat kerajaan mulai dari tingkat atas sampai ke tingkat bawah disebut wali-wali, sedangkan mereka yang telah memegang jabatan kerajaan disebut wali-wali mowali. Baik wali-wali maupun wali-wali mowali bertugas mengawasi wewenang dan tingkah laku olongia lipu. Apabila suatu ketika raja membuat pelanggaran adat istiadat yang berlaku, maka dilaksanakan musyawarah (duulohupa) yang dihadiri para wali-wali, wali-wali mowali, anggota bobato lo lipu dan para bate untuk membahas apakah olongia lipu melanggar adat istiadat atau tidak.

Demikian pula dalam pemerintahan kerajaan terdapat sebuah dewan yang anggotanya terdiri dari wulea lo lipu berasal dari keempat olongia yaitu Wulea lo lipu Hugginaa di samping sebagai huhuhu atau patila, juga bertugas mempertahankan wu'udu (peraturan adat) dan bubalata (kehidupan rakyat) yang dijalankan sesuai adat. Wulea lo lipu Lupoyo mendampingi kegiatan olongia lipu. Wulea lo lipu Billinggata sebagai apitalau juga bertugas

berpengalaman serta menjamin ketertiban setiap *ngalaa*. Selanjutnya kelompok-kelompok *laihe* berkembang dan membentuk satu komunitas masyarakat disebut *lemboa*. Dalam *lemboa* terdapat seorang pemimpin disebut *bantalo*. Dari beberapa *lemboa* inilah - mempunyai ikatan keluarga yang sama - kemudian membentuk satu-kesatuan sosial yang lebih besar disebut *linula* di bawah kepemimpinan seorang *olongia*.

14 A.H. Nusi. 1979. *Gambaran Singkat Tentang Kebudayaan dan Perjuangan Rakyat Gorontalo, Serta Masalah Pembangunan Kotamadya Gorontalo*. Gorontalo: Pemda Gorontalo, hlm. 3. Data ini selanjutnya diperjelas dan diperdalam melalui K. Kaluku. 1965. *Lukisan Segi Kebudayaan dari Limo lo Pohalaa*. 1. Gorontalo: tp, hlm. 13-29.

15 B.J. Haga, *op.cit*., hlm. 5. Baca G.J.F Riedel. 1870. "Het Landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Katinggola of Andagile, dalam *Tijschrift van Bataviaasch Genootschap voor IndischeTaal-, en Volkenkunde*. XIX, hlm. 66. Baca juga M. H. Lipoeto. 1943. *Sedjarah Gorontalo, Limo Lo Pohalaa*. Jilid 1. Gorontalo: Pertjetakan Ra'jat, hlm. 19.

16 J. Paulus. 1917. "Gorontalo" dalam *Encyclopaedie van Nederlandsch Indie*, *eerste deel*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, hlm. 805.

17 B. J. Haga, *op.cit*., hlm. 6. Baca juga Richard Tacco, *op.cit.,* hlm. 82-83.

menetapkan perang serta mengatur pemakaian alat perang, dan terakhir adalah Wulea lo lipu Wuwabu (Uwabu) mengurus pengadilan atau kehakiman dan kegiatan-kegiatan agama Islam.[18] Keempat linula ini secara langsung menempatkan pemimpinnya (olongia) memegang peran penting pada politik birokrasi kerajaan dan sebagai tiang utama dalam kerajaan.

Anggota dewan kerajaan lainnya adalah para bate[19] sebagai juru bicara para olongia kecil (Tilotta, Patunga atau Panggulo, Tapa, Huangotabu, Padengo, Biawaha, Dembe, dan Paguyaman). Mereka bertugas menetapkan adat istiadat, memilih dan memberhentikan olongia lipu, pengadilan agama, dan mengatur acara dalam kerajaan. Dalam menjalankan tugasnya para bate dibantu oleh para wuhu.[20]

4. Pemerintahan Kerajaan Gorontalo

Dalam pelaksanaan pemrintahan kerajaan terdapat olongia lipu sebagai penguasa tertinggi (wisesa) dibantu oleh huhuhu (saudara tua), yang perkembangan selanjutnya disebut patila (mangkubumi) bertugas membantu menjalankan urusan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya terdapat woe-oe yang bertugas mengatur hukum, tolomato bertugas sebagai pesuruh, pangangata bertugas mengatur tata tertib kerajaan, dan palabila bertugas menyampaikan peraturan-peraturan kerajaan kepada rakyat. Urusan keamanan kerajaan dijabat apitalau sebagai panglima yang menjaga keamanan kerajaan serta mengatur pasukan jika kerajaan dalam situasi perang.[21]

Kedudukan olongia lipu diwajibkan mementingkan urusan pemerintahan kerajaan dan kepentingan rakyatnya. Seorang olongia lipu tidak menggunakan kekuasaan mutlak yang bersifat otoriter dan dalam menjalankan wewenangnya harus sesuai dengan ketentuan adat dan syariat Islam. Setelah masuknya pengaruh Islam, Raja Motolodulakiki (1590) mengembangkan hukum adat dan ajaran Islam yang disebut: "adati hulahulaa to saraa, saraa hulahulaa to adati" (adat bersendi syara, syara bersendi adat).[22] Setiap kegiatan olongia lipu mendapat pengawasan atau kontrol dari para bate. Kaidah ini terucapkan pada upacara penobatan olongia lipu yang diikrarkan para bate dihadapan olongia lipu:

Timihupo to madala	*pimpinlah negeri*
To talohu to hulala	*dengan arif bijaksana*
Topobadari to Allah	*sesuai ketentuan Allah*
To azza wajalla	*yang menjadi wakil Allah*
Wolo nabi mursala	*dan Nabi yang mursala (suci atau benar)*
Loo wali oe sagala	*telah menciptakan segala-galanya*
agama to talu oe	*agama menjadi patokan utama*
lipoe poi hoelaloeoe	*dalam mengendalikan kerajaan*
oliide olim-boenga	*aturan-aturan dalam pemerintahan*
oladia poheloema	*didampingi oleh dewan pemusyawaratan.*[23]

Demikian pula tugas dan wewenang patila membawahi langsung pemerintahan sipil. Pada pelaksanaan penobatan patila dilakukan pula dengan tujai:

Patila molo wahula	*Patila akan diangkat*
Ito ta moho hehula	*saudara akan dinobatkan*
Wuudu wombu li wuwa	*antara bapak [olongia lipu] dan anak*
Bantala wawu tahuwa	*saudara dan penghulu*
U moqopijo lahuwa	*yang baik-baik diperdengarkan*
Ito malo pilimbila	*sudah menjadi pilihan*

18 C. B. H. von Rosemberg. 1865. *Reistogten In De Afdeeling Gorontalo*. Amsterdam: Frederik Muller, hlm. 16-17. Baca Richard Tacco, *op.cit.,* hlm. 99-100.

19 Menurut Lipoeto bahwa penggunaan kata "Bate" merupakan pengganti konsep *Lebidaa* (Hatibidaa), *Palingga* di Limboto, atau *Wu'u* di Suwawa. Kata Bate mulai dikenal tidak lama setelah Putri Ntobango dan Tiliaja kembali dari Gowa. Bate berasal dari bahasa Bugis/Makassar "*Batenna*" (orang yang pandai). Baca M. H. Lipoeto. 1943. *op.cit.,* jilid 1, hlm. 42.

20 B. J. Haga, *op.cit.*, hlm. 19.

21 C. B. H. von Rosemberg, *op.cit.,* hlm. 21.

22 Richard Tacco, *op.cit.,* hlm. 25.

23 *Ibid.*, hlm. 84-85. Baca juga K. Abdussamad, dkk., (peny.). 1985. *Empat Aspek Adat Gorontalo*. Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942, hlm. 68.

Pilimbila hilidune	*pilihan yang sudah ditetapkan*
Ito malo tilonuqo	*saudara telah menjadi pilihan utama*
Tilonuqo tunu meme	*pilihan yang harus merakyat*
Ito-itolo bohiqu	*saudaralah yang menjadi patila*
Ito-itolo lihidu	*saudara yang menjadi pagar*
Ta ambuwa de moilingo	*rakyat yang berkumpul*
Huluwa de moqajango	*rakyat yang memutuskan*
Titaqi boli wolata	*saudara yang bersikap*
Wolata boli poquwo	*rakyat yang diberi perintah*
Lo hulede piloduta	*saudara yang memerintah*
Lo huwangga depodio	*pedang sebagai alat*.[24]

Tugas utama dan wewenang patila adalah mengatur adat istiadat bagi kehidupan tuango lipu (rakyat), sehingga seorang patila harus mengetahui dan memahami adat istiadat; membantu mengatur pemerintahan kerajaan dan memperbaiki kekeliruan yang telah dilakukan oleh olongia lipu dengan cara bijaksana; mengatur perdagangan dan melindungi para pedagang; mengurus dan mengatur persediaan kebutuhan makanan pokok rakyat; melalui sebuah badan mengatur kaum ulama untuk pengajaran agama kepada rakyat; mengurus dan mengatur kesehatan rakyat; dan mengawasi batas-batas wilayah Gorontalo dan Limboto.[25]

Dalam menjalankan tugasnya, patila dibantu walaapulu dan sahabandalie (syahbandar).[26] Walaapulu bertugas sebagai penghubung kerajaan dengan rakyat, sehingga dalam tugasnya dibantu oleh para taudaa (kepala kampung); menjalankan setiap perintah olongia lipu melalui patila; mengatur dan mengawasi kehidupan rakyat dengan rasa aman dan memberikan laporan tentang keadaan penduduk kepada olongia lipu; mengeluarkan keputusan ekspor barang; dan mengawasi batas-batas wilayah Gorontalo dan Limboto.[27] Demikian pula kedudukan sahabandalie yang bertugas menarik bea atau pajak secara umum; mengatur perbendaharaan kerajaan; dan menarik cukai ekspor barang dan penilai barang.[28] Dapat dikatakan bahwa sahabandalie mempunyai wewenang sebagai lembaga perekonomian dalam kerajaan.

Kedudukan apitalau bertugas melindungi olongia lipu dan kerajaan; membawahi kekuasaan militer dan prajurit kerajaan; menghukum setiap prajuritnya yang berperilaku tidak terpuji atau bergabung dengan musuh kerajaan; mengiringi wakil olongia lipu apabila melakukan kunjungan baik di dalam maupun di luar kerajaan; dan mengawasi batas-batas wilayah Gorontalo dan Limboto. Dalam pelaksanaan tugasnya, apitalau dibantu oleh para majulu dikenal sebagai prajurit pemberani dan pekerja keras.[29]

Pembesar kerajaan lainnya adalah tuan kadli bertugas khusus dalam urusan keagamaan. Kadli mempunyai wewenang membawahi pengadilan agama dan waris, sehingga untuk memperlancar tugas-tugasnya dibantu oleh 2 hakimu (hakim), 4 imam, 4 saradaa, dan 2 hatibi (khatib).[30] Tugas imam dan saradaa adalah mengurus kegiatan setiap perayaan keagamaan atau

24 *Ibid.*, hlm. 91-92.

25 *Ibid.*, hlm. 93-94.

26 Syahbandar merupakan simbol tersendiri yang menandai posisi Gorontalo sebagai bagian yang terlibat dalam jalur 'perniagaan bahari' di Nusantara. Setidaknya Gorontalo memiliki dua pelabuhan utama sejak masa kolonial. Pelabuhan Gorontalo di Teluk Gorontalo-Teluk Tomini dan Pelabuhan Kwandang, bagian utara Gorontalo, berhadapan dengan Laut Sulawesi. Makin banyak jumlah syahbandar pada satu wilayah, maka itu menjadi petunjuk tentang besarnya arus barang, pelayaran, volume perdagangan, dan kunjungan kapal pada wilayah tersebut. Syahbandar berfungsi sebagai penghubung dan penengah utama antar kepentingan para pedagang pendatang dan pedagang lokal, terutama juga mengatur tentang pajak, harga-harga, mengawasi timbangan, ukuran dagangan dan mata uang yang dipakai, termasuk mengatur *persembahan* kepada raja setempat. Kajian lebih lanjut tentang pelayaran dan perniagaan Nusantara dapat dibaca dalam studi Adrian B. Lapian. 2008. *Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17*. Jakarta: Komunitas Bambu, hlm. 102-105.

27 Richard Tacco, *op.cit.*, hlm. 95-96.

28 *Ibid.*, hlm. 98.

29 *Ibid.*, hlm. 95.

30 C. B. H. von Rosemberg. *op.cit.*, hlm. 22.

hari-hari besar Islam yang diadakan di masjid.[31]

5. Kontrol Kekuasaan

Bagian pengawasan kerajaan di bawah langsung kekuasaan para bate - sebelumnya disebut bulomë. Mereka mempunyai wewenang dan peran penting dalam jalannya pemerintahan. Para bate mempunyai hak istimewa untuk memberhentikan olongia lipu, sebagaimana hal ini telah diikrarkan pada saat penobatan olongia lipu. Bilamana olongia lipu melakukan tindakan yang tidak terpuji dalam arti sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

Guna mengatur sistem kekuasaan pemerintahan terdapat 3 lembaga yang dapat juga dikatakan sebagai tiang kerajaan yaitu :

a. Buatula Bantayo tugas utamanya membuat peraturan-peraturan dan garis-garis besar tujuan kerajaan. Lembaga buatula bantayo dipimpin oleh para bate.
b. Buatula Bubato bertugas menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga buatula bantayo serta membawahi setiap kegiatan kerajaan, sehingga lembaga ini dipegang langsung oleh olongia lipu.
c. Buatula Bala bertugas mengamankan kerajaan dan urusan pengadilan yang secara langsung dikepalai apitalau.[32]

Kedudukan ketiga lembaga tersebut mempunyai saling keterkaitan dalam menjalankan tugasnya. Dalam pengambilan suatu kebijakan, dilaksanakan melalui duulohupa (musyawarah) untuk merumuskan berbagai peraturan yang akan ditetapkan dalam pelaksanaan kegiatan kerajaan. Bersatunya ketiga lembaga kerajaan dalam pertemuan musyawarah disebut buatula totolu. Dengan demikian bahwa kedudukan olongia lipu sebagai penguasa tertinggi tidak bersifat mutlak, dimana pada setiap pengambilan keputusan sangat tampak bahwa otoritas kerajaan tidak berpusat-tunggal kepada jabatan olongia lipu.

Perkembangan sistem politik kerajaan setelah masuknya pengaruh agama Islam dan terutama peran kesultanan Ternate membawa suatu dinamika sosial politik cukup besar bagi Gorontalo. Dengan demikian struktur pemerintahan serta hirarki kerajaan menjadi lebih kompleks. Jabatan patila misalnya kemudian disebut jogugu yang tetap bertugas mendampingi olongia lipu dalam mengurus pemerintahan. Jabatan wulea lo lipu disebut marsaoleh yang juga tetap bertugas sebagai penghubung antara olongia lipu dan rakyat. Di tingkat kelompok masyarakat terdapat kimalaka - pengaruh Ternate disebut kimalaha - atau kepala kampung dan tingkat paling bawah dikepalai oleh taudaa atau setingkat kepala dusun.[33]

Perubahan birokrasi kerajaan ikut mempengaruhi ketiga lembaga kerajaan tersebut menjadi dua lembaga kerajaan. Lembaga Buatula Bantayo tetap dipertahankan, sedangkan Buatula Bubato dan Buatula Bala disatukan menjadi Buatula Saraa. Pembentukan lembaga Buatula Saraa dimaksudkan agar pemerintahan, keamanan, dan kegiatan urusan keagamaan menjadi satu kesatuan. Dengan demikian, pelaksanaan pemerintahan dan agama terletak di dalam satu kepemimpinan disebut patila, apitalau, dan kadli.

Sehubungan dengan kemajuan pemerintahan kerajaan, maka dalam hirarki kerajaan dibentuk sebuah dewan kerajaan disebut Bantayo Poboqide yang anggotanya antara lain para bate, di samping itu terdapat pula para monggopanggola (tetua masyarakat) dan tulaibala (tokoh masyarakat), yang keduanya diangkat melalui para wakil masyarakat dari setiap linula.[34] Lembaga ini

31 Richard Tacco. *op.cit*., hlm. 97.

32 B. J. Haga, *op.cit*., hlm. 26.

33 *Ibid*., hlm. 8.

34 Beberapa kerajaan-kerajaan di Indonesia Timur seperti Buton, Bima, Dompo, Sanggar, dan Sumbawa juga mendirikan sebuah lembaga dewan kerajaan disebut *Hadat*. Lembaga *Hadat* mempunyai tugas dan fungsi hampir sama dengan dewan Kerajaan Gorontalo.

bertugas mengangkat dan memberhentikan olongia lipu. Dengan demikian masa kekuasaan olongia lipu tidak ditentukan oleh batas waktu tertentu, melainkan dari segi kemampuan dan kesetiannya dalam menjalankan peraturan dan tugas yang ditetapkan dalam norma-norma hukum, agama, dan adat istiadat.

Di samping wewenang dan fungsi Bantayo Poboqide adalah merumuskan berbagai permasalahan menyangkut jalannya pemerintahan, meliputi:

a. Membahas permasalahan menyangkut kesejahteraan kerajaan (lipu), terutama kebutuhan akan kesehatan dan persediaan bahan makanan bagi tuango lipu (rakyat).
b. Menetapkan adat dan hukum adat, dalam arti bahwa pengambilan keputusan pada permasalahan adat dan hukum adat tidak ditetapkan oleh olongia lipu. Permasalahan adat dan hukum adat harus diselesaikan melalui duulohupa atau musyawarah baik menyangkut kehidupan di lingkungan kerajaan maupun masyarakat. Setiap adat dan hukum adat harus dipatuhi oleh olongia lipu dan rakyat. Salah satu adat dan hukum adat yang sering menjadi permasalahan penting dalam kehidupan masyarakat adalah tentang perkawinan. Kebiasaan berlaku dalam setiap kerajaan bagi seorang keturunan olongia lipu atau bangsawan harus kawin dengan sesama keturunan bangsawan, dan tidak diharuskan kawin dengan keturunan rakyat biasa.[35] Walaupun demikian, lambat laun tradisi ini telah mengalami pergeseran, sehingga tidak ada lagi larangan bagi seorang pria atau wanita dari kedudukan strata sosial yang lebih tinggi mengawini seorang dari kedudukan strata sosial yang lebih rendah.[36]
c. Memilih dan menobatkan olongia lipu serta para pembesar kerajaan. Seorang olongia lipu dan pembesar kerajaan dalam menjalankan kekuasaannya tidak bersifat mutlak atau otoriter. Begitupula jika olongia lipu berhalangan atau meninggal, maka tidak secara langsung diganti oleh keturunannya. Suksesi kerajaan dipilih dan ditetapkan melalui lembaga Bantayo Poboqide. Peraturan ini juga berlaku bagi para pembesar kerajaan. Dalam penobatan olongia lipu dan pembesar kerajaan harus dilaksanakan dengan adat.[37]
d. Mengawasi atau mengontrol pelaksanaan pemerintahan kerajaan. Setiap kegiatan pemerintahan berada dalam pengawasannya yang telah disesuaikan dengan adat dan hukum adat yang ditetapkan.
e. Meminta pertanggungjawaban olongia lipu. Dalam menjalankan kekuasaannya, olongia lipu harus berpedoman dan memegang teguh adat dan hukum adat yang ditetapkan oleh Bantayo Poboqide. Jika dalam kekuasaannya, olongia lipu menyimpang atau melanggar adat dan hukum adat, maka anggota Bantayo Poboqide mengadakan musyawarah untuk menyusun suatu gugatan dan meminta pertanggungjawaban olongia lipu.

6. Penutup

Pertumbuhan awal Kerajaan Gorontalo dibentuk melalui sistem sosial yang demokratis yakni melalui proses pengangkatan olongia lipu yang dilakukan berdasarkan mekanisme pemilihan oleh para pemimpin linula. Dalam perjalanan sejarahnya, wewenang ini diambil alih oleh para bate

35 Mekanisme ini dilakukan untuk mempertahankan status kebangsawanannya - lapisan sosialnya - dengan kecenderungan melakukan perkawinan endogami pada sesama kerabat kerajaan.

36 B. J. Haga, *op.cit.,* hlm. 32.

37 Walaupun demikian suksesi kerajaan sering bersumber pada soal peran seseorang, sehingga *piili* (perilaku), *popoli* (kepintaran, pengalaman dan pengabdian), dan *kauli* (perkataan) menjadi hal yang utama dalam penilaian bagi anggota *Bantayo Poboqide* (dewan kerajaan).

sebagai juru bicara dari para linula. Hal ini tampak jelas bahwa sistem pemerintahan Kerajaan Gorontalo mempunyai keunikan dengan kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Dapat dikatakan bahwa sejak awal pemerintahan Kerajaan Gorontalo bersifat "demokrasi". Gorontalo telah memberi pemahaman tentang peran atau otoritas seorang olongia lipu tidak mutlak, dalam arti olongia lipu dapat diturunkan sewaktu-waktu oleh peran para bate yang telah mengangkatnya. Selain itu masa kekuasaan olongia lipu tidak ditentukan oleh batas waktu tertentu, melainkan dari segi kemampuan dan kesetiaannya menjalankan peraturan yang ditetapkan dalam norma hukum, agama, dan adat istiadat.

Salah satu pilar demokrasi Gorontalo dalam mengatur dan menjalankan konsep kekuasaan pemerintahan kerajaan dengan membagi tiga lembaga politik kerajaan yaitu Buatula Bantayo, Buatula Bubato, dan Buatula Bala. Penerapan konsep pemisahan kekuasaan bahwa ketiga lembaga tetap berada dalam keadaan seimbang, sehingga mekanisme hubungan antara lembaga saling mengendalikan dan mengawasi satu sama lain. Fungsi legislatif biasanya dikaitkan dengan peran lembaga parlemen atau Buatula Bantayo, fungsi eksekutif dikaitkan dengan peran pemerintah atau Buatula Bubato, dan fungsi judikatif dikaitkan dengan lembaga peradilan atau Buatula Bala.

Setiap permasalahan kerajaan dicapai keputusan dengan melakukan duulohupa (musyawarah) untuk mufakat. Para bate berkumpul untuk memusyawahkan sesuatu dan diputuskan dengan suara terbanyak. Untuk itu, apabila olongia lipu melakukan pelanggaran atau menyimpan dari aturan-aturan yang ditetapkan, maka para bate menegur dan sampai pada tingkat lanjut, bate berhak memberhentikan olongia lipu melalui musyawarah Bantayo Poboqide.

Peranan Bantayo Poboqide sangat besar dan penting dalam kelangsungan kerajaan. Di samping merumuskan dan menetapkan peraturan dalam kerajaan, juga mengatur kehidupan keagamaan dan adat istiadat. Fungsi utama Bantayo Poboqide adalah menjadi alat kontrol dalam kekuasaan olongia lipu, sehingga olongia lipu tidak mempunyai hak mutlak dalam pengambilan suatu keputusan. Begitupula dalam pemilihan dan penobatan seorang olongia lipu dilaksanakan melalui musyawarah Bantayo Poboqide. Hal ini mencerminkan bahwa kedudukan olongia lipu ditentukan melalui kriteria dan kharismatik (achievement status), bukan melalui keturunan atau diwariskan (ascribed status). Sehingga dapat memberi pemahaman bahwa skala sistem politik serta format kerajaan sering menjadi faktor penentu dari struktur kekuasaan yang dibangun di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, K., dkk., (peny.). 1985. Empat Aspek Adat Gorontalo. Jakarta: Yayasan 23 Januari 1942.

Bastiaans, J. 1996. "Persekutuan Limbotto dan Gorontalo" dalam Taufik Abdullah (ed.). Sejarah Lokal di Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Frederick, William H. & Soeri Soeroto, (peny.). 1984. Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES.

Haga, B.J. 1931. De Lima-pahalaä (Gorontalo): Volksordening, adatrecht en bestuurspolitiek, LXXI. Bandoeng: A.C Nix & Co.

Hoevel, G.W.W.C Baron van. 1891. "Onder Rechtstreeksch Bestuur Is Gebracht", De Assistant-Residentie Gorontalo. Leiden: E.J. Brill.

Juwono, Harto & Yosephine Hutagalung (2005), Limo lo Pohalaa: Sejarah Kerajaan Gorontalo. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Kaluku, K. 1965. Lukisan Segi Kebudayaan dari Limo lo Pohalaa. Jilid 1. Gorontalo: tp.

Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT. Gramedia.

----------. 1993. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium. Jilid 1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Lapian, Adrian B. 2008. Pelayaran dan Perniagaan Nusantara Abad ke-16 dan 17. Jakarta: Komunitas Bambu.

Lipoeto, M.H. 1943. Sedjarah Gorontalo, Limo Lo Pohalaa. Jilid 1. Gorontalo: Pertjetakan Ra'jat.

----------. 1949. Sedjarah Gorontalo, Limo Lo Pohalaa. Jilid X. Gorontalo: Pertjetakan Ra'jat.

----------. 1950. Sedjarah Gorontalo, Limo Lo Pohalaa. Jilid XII. Gorontalo: Pertjetakan Ra'jat.

Notosusanto, Nugroho. 1978. Masalah Penelitian Kontemporer (Suatu Pengalaman). Jakarta: Yayasan Idayu.

Nusi, A.H. 1979. Gambaran Singkat Tentang Kebudayaan dan Perjuangan Rakyat Gorontalo, Serta Masalah Pembangunan Kotamadya Gorontalo. Gorontalo: Pemda Gorontalo.

Paulus, J. 1917. "Gorontalo" dalam Encyclopaedie van Nederlandsch Indie, eerste deel. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.

Rosemberg, C.B.H. von. 1865. Reistogten In De Afdeeling Gorontalo. Amsterdam: Frederik Muller.

Riedel, G.J.F. 1870. "Het Landschappen Holontalo, Limoeto, Bone, Boalemo en Katinggola of Andagile, dalam Tijschrift van Bataviaasch Genootschap voor IndischeTaal-, en Volkenkunde. XIX.

Suhartono. 1996. "Birokrasi, Kolusi dan Kriminalitas: Refleksi Historis" dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta: UGM.

Tacco, Richard. 1935. Het Volk Van Gorontalo: Historich Traditioneel Maatschappelijk Cultural Sociaal Karakteristiek en Economisch. Gorontalo: Gorontalo Drukkerij.